

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir, M. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arikunto, S. (2012). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, John W. (2014). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedrich, C.J. (2004). Filsafat Hukum Perspektif Historis. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Kasiram, M. (2010). Metodologi Penelitian Kuantitatif–Kualitatif. Yogyakarta: UIN Maliki Press.
- Maiyesti, J. (2022). Metode Penelitian Hukum. Sumatera Barat: LPPM Universitas Bung Hatta.
- Mertokusumo, Sudikno. (2007) Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Putra, Nyoman J.S. (2010). Kapita Selekta Hukum Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Poernomo, B. (1986). Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan. Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, Satjipto. (1996). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ruslan, Renggong. (2011). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Makassar: Clavia
- Saragih, Bintan R. (2017). Metodologi Penelitian Hukum Empiris. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shafira, Maya, dkk. (2022). Hukum Pemasyarakatan dan Penintensier. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Simon, R. & Josias, A. (2012). Budaya Penjara: Pemahaman dan Implementasi. Bandung: Karya Putra Darwati.
- Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.

- Solikin, Nur. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan: Qiara Media.
- Soedarto, (1981). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni
- Sudewo, Fajar Ari. (2022). Penologi dan Teori Pidana. Tegal: Djawa Sinar Perkasa.
- Sugiyono. (2016). Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiono. (2010). Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta
- Sulchan, A. Akhmad Khisni, A. & Witasari, A. (2020). Pola Pembinaan Narapidana yang Berkeadilan (Studi di Lapas Kedungpane Semarang), Semarang: Unissula Press.
- Sulisworo, Dwi. (2012). Hak Azasi Manusia. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Rhona K.M., Smith, Hostmaelingan Nijal, Christian Ranheim, Satya Arinanto, and Fajrul Falaakh. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
- Rhona K.M., Smith.(2001). Human Rights: University and University. London: Martinus Nijhoff Publishers
- Waluyo, Bambang. (2023). Sistem Pemasarakatan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel Jurnal :

- Hidayat, E. (2017). "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia". Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 8, No. 2, Juni 2017, hlm. 80
- Michael, D. (2017). "Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Klas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia". Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 17 Nomor 2, Juni 2017, hlm. 250.
- Muhammad, Ilyas. (2015). "Hak Asasi Manusia Dalam Perkembangan Rule Of Law". Jurnal Pusham Unimed VI, No. I/4. Maret 2015, hlm.145.
- Mulyadi, (2023), "The Legal Position of Fingerprints in Revealing Criminal Acts of Murder", Ratio Legis Journal, Volume 2 No. 1, March 2023, p.248.
- Nur Aeni, M.D. & Bawono, T. (2020). "Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Hukum Dan Keadilan v.2, no. 8, hlm. 446

- Rizkyana, T.N. dan Utami, D.Y. (2021). "Relevansi HAM Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN 8, No. 1 . Juni 2021, hlm.41.
- Rudiyanto, A. (2017). "Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Tegal)", Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 12 Nomor 4 Desember 2017, hlm.928.
- Siahaan, J. & Rinwigati, P. (2024). "Kebijakan Ham Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat Kepada Koruptor." UNES Law Review, Vol. 6, No. 2, Desember 2023, hlm. 7236-7247. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Suparji, A. (2011). "Pelaksanaan Pembinaan Dan Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan Pada Lembaga Pemasysarakatan Klas II B Pangkalan Bun". Sociosientia, Volume 3 Nomor 1, Februari 2011. hlm. 142
- Tucunan, E.J. (2014). "Hak Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi". Lex Crimen III Journal, no. 1. March 2014, hlm.101

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysarakatan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Komponen Standar Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasysarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang bebas, dan Cuti Bersyarat
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasysarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasysarakatan dan Rumah Tahanan Negara
- Keputusan Direktorat Jenderal Pemasysarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasysarakatan
- Instruksi Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.OT.04 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysarakatan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-20.OT.02.02 Tahun 2022 tentang Pemenuhan Hak Bersyarat Terhadap Narapidana Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Penulisan yang tidak diterbitkan :

Gustika Putra, D. (2018). Pelaksanaan Hak Narapidana untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang. Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Islamiyah, W. (2017). “Analisis Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Barru”. Hasil Penelitian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Koentjoro, (2006). “Psikologi dan Perubahan Sosial”, Makalah, Disampaikan pada Perkuliahan Pasca Sarjana Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

Sunaryo, Thomas. (2001). Diktat/Materi Kuliah Sistem Pemasyarakatan Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Atmajaya Jakarta, hlm.58

Halaman Internet :

Kemenkumham Jawa Timur. (2024). “Sosialisasi Penerapan Hak-Hak Narapidana Narapidana Di Lapas Ditinjau Dari Perspektif HAM”, diambil dari <https://jatim.kemenkumham.go.id> pada tanggal 15 Mei 2024.